

BUPATI LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 55 TAHUN 2019

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Lombok Barat;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a. maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 – 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4737);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat tahun 2015 Nomor 130);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 169);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2019 – 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran kinerja, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
2. Indikator Kinerja Daerah adalah Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan ataupun sasaran Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan – kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
3. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan

tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

4. Pemantauan kinerja adalah serangkaian kegiatan pengamatan perkembangan kinerja pelaksanaan kegiatan atau program dengan menggunakan informasi hasil pengukuran kinerja, dan identifikasi, analisis serta antisipasi masalah yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
5. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
6. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
7. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari APBN dan atau APBD.
8. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
9. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program, atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

BAB II

INDIKATOR KINERJA DAERAH

Pasal 2

- (1) Indikator Kinerja Daerah terdiri dari :
 - a. Indikator Kinerja Utama Daerah;
 - b. Indikator Kinerja Kunci Daerah.
- (2) Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah indikator sasaran RPJMD yang merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk memberi gambaran tentang keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati.
- (3) Indikator Kinerja Kunci Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah indikator tujuan RPJMD, indikator sasaran RPJMD dan indikator sasaran Renstra Perangkat Daerah, yang merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk memberi gambaran tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah dan aspek pelayanan umum.

Pasal 3

- (1) Indikator Kinerja Utama Daerah merupakan acuan ukuran kinerja Daerah untuk menetapkan kinerja tahunan, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I (satu).
- (2) Indikator Kinerja Kunci Daerah merupakan acuan ukuran kinerja Perangkat Daerah untuk menyusun dan menetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, indikator kinerja tahunan, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja tahun 2020 - 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II (dua).
- (3) Penyusunan dan penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III (tiga).

BAB III

PERENCANAAN KINERJA, PENGUKURAN DAN PELAPORAN KINERJA, REVIU DAN EVALUASI KINERJA

Pasal 4

- (1) Perencanaan kinerja meliputi penyusunan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan dan penyusunan perjanjian kinerja.
- (2) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dokumen RPJMD dan dokumen Renstra Perangkat Daerah.
- (3) Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dokumen tahunan yang merupakan Perjanjian Kinerja Bupati di tingkat daerah dan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah sampai dengan level eselon III dan eselon IV.
- (4) Penyusunan dokumen perencanaan dan penyusunan perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikoordinasikan oleh BAPPEDA.

Pasal 5

- (1) Pengukuran Kinerja dilakukan oleh seluruh Perangkat Daerah dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja.
- (2) Pengukuran kinerja disajikan dalam Laporan Kinerja Tahunan.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penyampaian Laporan Kinerja Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan disampaikan ke Bupati melalui Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah.
- (4) Berdasarkan Laporan Kinerja Tahunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah



sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Inspektorat Kabupaten Lombok Barat melakukan reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.
- (2) Inspektorat melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP dan/atau evaluasi kinerja sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan kewenangannya.
- (3) Laporan evaluasi atas implementasi SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Inspektorat kepada Bupati.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat

Ditetapkan di Gerung
Pada tanggal 18 November 2019

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
Pada tanggal 18 November 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,


H. MOH. TAUFIQ

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2019 NOMOR 55



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT NOMOR TAHUN 2019
 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH
 PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2019 - 2024

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
 TAHUN 2019-2024**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PENJELASAN/RUMUS PENGHITUNGAN	SATUAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB	PERANGKAT DAERAH dan PIHAK PENDUKUNG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1 Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	nilai	Pihak Independen	Bappeda, Setda, Inspektorat	Semua OPD
2 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	2 Opini BPK terhadap LKPD	Opini BPK	Opini	BPK	BPKAD	Semua OPD
3 Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Daerah	3 Nilai AKIP Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Pemerintah Daerah	Huruf dan Angka	Kementerian PAN dan RB	Bappeda, Setda, Inspektorat	Semua OPD
4 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Wilayah	4 Persentase Wilayah terhubung dengan pusat-pusat perekonomian	(Pasar Dapat Dilalui Roda 4*Objek Wisata Dapat Dilalui Roda 4*Pasar Memiliki Trayek*Objek Wisata Memiliki Trayek)^0,25	Indeks composit	PU,perindag,Dishub	Dishub	Dishub,Disperindag, dan PUTR
5 Meningkatnya akses infrastruktur dasar	5 Persentase Rumah Layak Huni	$\frac{\text{Jumlah Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Seluruh Rumah}} \times 100$	%	Dinas Perumahan dan Permukiman	Dinas Perumahan dan Permukiman	Dinas PUTR
	6 Persentase Masyarakat yang mendapatkan akses terhadap air minum	$\frac{\text{Jumlah Masyarakat Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM dengan Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi}}{\text{Jumlah penduduk X100}} \times 100$	%	Dinas PUTR	Dinas PUTR, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Kesehatan	Dinas PUTR
6 Meningkatnya Daya Saing sektor ekonomi unggulan	7 Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	$\frac{\text{Nilai Realisasi PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100$	%	Bapenda dan BPKAD	Bapenda	OPD Penghasil PAD
	8 Nilai PDRB Perkapita	PDRB Perkapita	Rp.Juta	BPS	Seluruh OPD	Seluruh OPD
	9 Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi :					
	PMDN	Nilai Realisasi PMDN (Fasilitas) tahun yg dihitung	Rp. Milyar	DPMPPTSP	DPMPPTSP	Dinas PUTR, Pariwisata dan SETDA
	PMA	Nilai Realisasi PMA tahun yg dihitung	\$ juta			

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PENJELASAN/RUMUS PENGHITUNGAN	SATUAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB	PERANGKAT DAERAH dan PIHAK PENDUKUNG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7 Meningkatnya Kemandirian ekonomi masyarakat	10 Indeks Gini Rasio	$G = 1 - \sum f_i (Y_i + Y_{i+1})$ G = Ratio Gini f _i = Proporsi Rumah Tangga dlm Kls i Xi = Proporsi Jumlah Kumulatif RT dlm Kls i Yi = Proporsi jumlah kumulatif pendapatan dlm Kls i	Indeks	Badan Pusat Statistik	Disperindag, Dinas Koperasi, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan, Dinas tenaga Kerja, Dinas Pariwisata dan Badan Ketahanan Pangan Daerah	Dinsos, Disnaker, Koperasi, DPMD, DP2KBP3A
	11 Persentase Angka Kemiskinan	$\frac{\text{Jumlah Penduduk dibawah garis kemiskinan}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100$	%	Badan Pusat Statistik	Dinsos, Dukcapil, Dinas Ketahanan Pangan	Seluruh OPD, Forum CSR, BAZNASDA dan Pemerintah Desa
	12 Tingkat pengangguran terbuka	$\frac{\text{Jumlah orang yang tidak bekerja}}{\text{Jumlah angkatan Kerja}} \times 100$	%	Badan Pusat Statistik	Dinas Tenaga Kerja	Dinas Sosial, Dieperindag, Diskop dan UKM, Dinas Pertanian, Perikanan, Pariwisata
8 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	13 Usia Harapan Hidup	$\frac{\text{Jumlah umur semua penduduk yg meninggal}}{\text{Jumlah penduduk yang meninggal}}$	Tahun	Badan Pusat Statistik	Dinas Kesehatan	Semua OPD
		14 Rata-rata Lama Sekolah		tahun	Badan Pusat Statistik	Dinas Pendidikan dan kebudayaan
9 Meningkatnya kualitas dan mutu pendidikan	15 Harapan Lama Sekolah		tahun	Badan Pusat Statistik	Dinas Pendidikan dan kebudayaan	Seluruh Perangkat Daerah
	10 Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	16 Kabupaten Layak Anak	Penilaian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Skors	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DP2KBP3A
17 Indeks Pembangunan Gender		$\frac{\text{IPM Perempuan}}{\text{IPM Laki-laki}} \times 100$	Skors	BPS	Bakesbangpoldagri, Satpol PP, BPBD, Damkar	Seluruh Perangkat Daerah

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PENJELASAN/RUMUS PENGHITUNGAN	SATUAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB	PERANGKAT DAERAH dan PIHAK PENDUKUNG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	18 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	(Indeks Kualitas Air x 30%) + (Indeks Kualitas Udara x 30%) + (Indeks Kualitas Tutupan Lahan x 40%)	Indeks	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Semua OPD dan Masyarakat
12 Menurunnya Risiko Bencana	19 Indeks Risiko Bencana	Indeks Ancaman x Indeks Kerentanan	Indeks	BPBD	BPBD	Dinas Pemadam Kebakaran, SatPOLPP, Kesbang, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan
		Indeks Kapasitas Daerah				

BUPATI LOMBOK BARAT.



H. FAUZAN KIALID



INDIKATOR KINERJA KUNCI PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
 TAHUN 2019-2024

NO	ASPEK/ BIDANG URUSAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	PENJELASAN/RUMUS PENGHITUNGAN	SATUAN	PENANGGUNG JAWAB	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
1	Meningkatnya daya saing sektor ekonomi unggulan	Nilai PDRB Perkapita	$\frac{\text{Nilai PDRB}}{\text{Jumlah Penduduk}}$	Juta Rupiah	Seluruh OPD	IKU
2	Meningkatnya kemandirian ekonomi masyarakat	Indeks Gini Rasio	$G = 1 - \sum f_i (Y_i + Y_{i+1})$ G = Ratio Gini fi = Proporsi Rumah Tangga dlm Kls i Xi = Proporsi Jumlah Kumulatif RT dlm Kls i Yi = Proporsi jumlah kumulatif pendapatan dlm Kls i	Indeks	Disperindag, Diskop UKM, Diperta, DKP, Disnaker, Dispar, Dikpangan, Dinsos, DPMD, DP2KBP3	IKU
3	Meningkatnya akses infrastruktur dasar	Angka Kemiskinan	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100$	Persen	Dinsos, Dukcapil, Dikpangan	IKU
4		IPM	$IPM = \sqrt[3]{\text{Kesejahteraan} \times \text{Kemiskinan} \times \text{Pertumbuhan}}$	Indeks	Seluruh OPD	INDIKATOR TUJUAN
5		Pertumbuhan Ekonomi	$GI = \frac{(PDB_t - PDB_{t-1})}{PDB_{t-1}} \times 100\%$	Persen	Bapenda, DPMPSTP, Disperindag, Disperindag, Diskop UKM, Diperta, DKP, Disnaker, Dispar,	INDIKATOR TUJUAN
6	Meningkatnya kualitas dan mutu pendidikan	RLS	$RLS = \frac{\sum P_i S_i}{\sum P_i}$	Tahun	DIKBUD	IKU
7		HLS	$HLS = FK \times \frac{\sum E_i}{\sum M_i}$	Tahun	DIKBUD	IKU
8	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	UHH	$UHH = \frac{P - P_0}{P_0} \times 100$	Tahun	DIKES, RSUD	IKU
9		Pengeluaran Perkapita	$PPP = \left[\frac{P}{M} \right]^{1/n}$	Rp.(000)	Disperindag, Diskop UKM, Diperta, DKP, Disnaker, Dispar	Komponen Pembentuk IPM
10	Meningkatnya kemandirian ekonomi masyarakat	TPT	$\frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100$	Persen	DISNAKER	IKU
11	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	IKM	Nilai Indeks Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Nilai	Seluruh OPD	IKU
12	Meningkatnya daya saing sektor ekonomi unggulan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	$\frac{\text{PAD}}{\text{Pendapatan Daerah}} \times 100$	Persen	BAPENDA	IKU

NO	ASPEK/ BIDANG URUSAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	PENJELASAN/RUMUS PENGHITUNGAN	SATUAN	PENANGGUNG JAWAB	KET
13	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	OPINI BPK	Penilaian BPK	Opini	BPKAD	IKU
14	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai AKIP Daerah	Penilaian MENPAN RB	Nilai	BAPPEDA, SETDA, INSPEKTORAT Beserta Seluruh OPD	IKU
15		Indeks Reformasi Birokrasi	Penilaian MENPAN RB	Indeks	SETDA, INSPEKTORAT Beserta Seluruh OPD	INDIKATOR TUJUAN
16		Indeks Kebermanfaatan Infrastruktur	(Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap x Persentase Wilayah Terhubung dengan moda transportasi x Persentase RLH x Persentase RT dengan akses air minum layak x Persentase RT dengan sanitasi layak) ^0,2	Persen	DPUTR, DISHUB	INDIKATOR TUJUAN
17	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	(Indeks Kualitas Air x 30%) + (Indeks Kualitas Udara x 30%) + (Indeks Kualitas Tutupan Lahan x 40%)	Indeks	DLH	IKU
18	Meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah	Persentase Wilayah Terhubung dengan Pusat Perekonomian	(Pasar Dapat Dilalui Roda 4*Objek Wisata Dapat Dilalui Roda 4*Pasar Memiliki Trayek*Objek Wisata Memiliki Trayek)^0,25	Persen	DPUTR	IKU
19	Meningkatnya akses infrastruktur dasar	Persentase Rumah Layak Huni	$\frac{\text{Jumlah Seluruh Rumah Layak Huni disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah rumah disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}} \times 100$	Persen	DISPERKIM	IKU
ASPEK DAYA SAING DAERAH						
20	Meningkatnya Kondusivitas Wilayah	Persentase Kasus Konflik SARA yang tertangani	$\frac{\text{Kasus Konflik Sara yang Terjadi}}{\text{Kasus Konflik Sara yang Tertangani}} \times 100$	Persen	BAKESBANGPOL	IKK
21	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Skor Kabupaten/Kota Layak Anak	Penilaian Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Skor	DP2KBP3A	IKU
22	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	IPG	$\frac{\text{IPM Perempuan}}{\text{IPM Laki - Laki}} \times 100$	Skor	DP2KBP3A	IKU

NO	ASPEK/ BIDANG URUSAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	PENJELASAN/RUMUS PENGHITUNGAN	SATUAN	PENANGGUNG JAWAB	KET	
ASPEK PELAYANAN UMUM							
Urusan Wajib Pelayanan Dasar							
PENDIDIKAN							
23	Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan	APK			DIKBUD	IKK	
		Angka Partisipasi Kasar TK/PAUD	$\frac{\text{Jumlah Siswa TK/PAUD}}{\text{Penduduk usia TK/PAUD}}$	X 100			Persen
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	$\frac{\text{Jumlah Siswa SD}}{\text{Penduduk usia SD}}$	X 100			Persen
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	$\frac{\text{Jumlah Siswa SMP}}{\text{Penduduk usia SMP}}$	X 100			Persen
24		Angka Partisipasi Murni					
		Angka Partisipasi Murni TK/PAUD	$\frac{\text{Jumlah Siswa Usia TK/PAUD}}{\text{Penduduk usia TK/PAUD}}$	X 100			Persen
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD	$\frac{\text{Jumlah Siswa Usia SD}}{\text{Penduduk usia SD}}$	X 100	Persen			
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	$\frac{\text{Jumlah Siswa Usia SMP}}{\text{Penduduk usia SMP}}$	X 100	Persen			
25	Meningkatnya Mutu Layanan Pendidikan	Angka Putus Sekolah					
		Angka Putus Sekolah SD	Jumlah murid putus sekolah di tingkat pendidikan tertentu	X 100	Persen		
		Angka Putus Sekolah SMP	Jumlah siswa di tingkat pendidikan tertentu		Persen		
26		Angka Kelulusan					
		Angka Lulusan SD	Jumlah murid yang lulus di tingkat pendidikan tertentu		Persen		
		Angka Lulusan SMP	Jumlah seluruh murid pada tingkat pendidikan tertentu	X 100	Persen		
KESEHATAN							
27	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Kematian Bayi	$\frac{\text{Jumlah kematian bayi (umur 0-1th)}}{\text{Kelahiran Hidup}}$	X 1000	DIKES	IKK	
							Per 1000 KH
28		Angka Kematian Ibu	$\frac{\text{Jumlah kematian karena kehamilan, persalinan, masa nifas atau komplikasi2nya selama 1 periode}}{\text{Jumlah kelahiran hidup selama periode yang sama}}$	X 100.000 KH			Per 100.000 KH
29		Indeks Keluarga Sehat (IKS)	$\frac{\text{Jumlah Keluarga dengan IKS > 0,800}}{\text{Jumlah Seluruh Keluarga}}$		IKS		
30		Persentase Stunting	$\frac{\text{Jumlah Balita dengan tinggi dibawah standar}}{\text{Jumlah Balita Yang Diukur}}$	X 100	Persen		
31		Pemenuhan Indikator SPM RSUD	Jumlah Indikator SPM RS yang terpenuhi		Indikator	RSUD IKK	

NO	ASPEK/ BIDANG URUSAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	PENJELASAN/RUMUS PENGHITUNGAN	SATUAN	PENANGGUNG JAWAB	KET
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang						
32	Meningkatnya Kondisi Kemantapan Jalan	Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap	$\frac{\text{Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik} + \text{Sedang}}{\text{Panjang Jalan}} \times 100$	Persen	DPUTR	IKK
33	Meningkatnya Pengendalian dan Pemanfaatan Penataan Ruang	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	$\frac{\text{Realisasi RTRW}}{\text{Rencana Peruntukan}} \times 100$	Persen		IKK
34	Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pelayanan Dasar Sanitasi	Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Layak	$\frac{\text{Jumlah Rumah Tangga dengan akses Sanitasi Layak}}{\text{Jumlah Rumah Tangga}} \times 100$	Persen		IKK
35	Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pelayanan Dasar Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum	$\frac{\text{Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM dengan Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi}}{\text{Jumlah Rumah Tangga}} \times 100$	Persen		IKU
36	Meningkatnya Penyediaan Air Irigasi dan Air Baku Untuk Produktifitas Lahan Pertanian dan Pemenuhan Air Multi Sektor	Persentase Saluran Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	$\frac{\text{Panjang Saluran Irigasi Dalam Kondisi Baik}}{\text{Panjang Saluran Irigasi seluruhnya}} \times 100$	Persen		IKK
Perumahan Permukiman						
37	Meningkatnya Penanganan Infrastruktur Yang Layak Di Kawasan Lingkungan Kumuh	Persentase Penanganan Lingkungan Permukiman Kumuh	$\frac{\text{Luas area permukiman kumuh tertangani}}{\text{Luas area permukiman kumuh seluruhnya}} \times 100$	Persen	DISPERKIM	IKK
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat						
38	Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah	Persentase Pelanggaran PERDA yang ditangani	$\frac{\text{Jumlah Pelanggaran Perda Yang Ditangani}}{\text{Jumlah Seluruh Pelanggaran Perda}} \times 100$	Persen	SATPOL PP	IKK
39	Menurunnya Risiko Bencana	Indeks Risiko Bencana	$\frac{(\text{Indeks Ancaman} \times \text{Indeks Kerentanan})}{\text{Indeks Kapasitas Daerah (Dengan Asumsi Indeks Ancaman dan Kerentanan Tetap)}}$	Indeks	BPBD	IKU
40	Meningkatnya Kapasitas Daerah	Indeks Kapasitas Daerah	Pemenuhan komponen Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan; Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu; Pengembangan Infirmasi, diklat dan logistik; Penanganan Tematik kawasan rawan bencana; pencegahan dan mitigasi bencana; kesiapsiagaan prb dan penguatan sistem pemulihan bencana	Indeks	BPBD	IKK
41	Meningkatnya Pelayanan Terhadap Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	Layanan Response Time Penanggulangan kejadian kebakaran 15 menit	$\frac{\text{Jumlah Layanan Response Time Penanggulangan kejadian kebakaran 15 menit}}{\text{Jumlah Seluruh Layanan kejadian kebakaran}} \times 100$	Persen	DISDAMKAR	IKK

NO	ASPEK/ BIDANG URUSAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	PENJELASAN/RUMUS PENGHITUNGAN	SATUAN	PENANGGUNG JAWAB	KET
Sosial						
42	Meningkatkan Cakupan Penanganan PMKS dan Pemberdayaan PSKS	Persentase PMKS Yang Tertangani	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang tertangani}}{\text{Jumlah PMKS}} \times 100$	Persen	DINSOS	IKK
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar						
Tenaga Kerja						
43	Menurunnya Angka Pengangguran	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	$\frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah penduduk usia kerja}} \times 100$	persen	DISNAKER	IKK
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
44	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	$\frac{\text{Jumlah penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan}}{\text{Jumlah kasus pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan}} \times 100$	Persen	DP2KBP3A	IKK
Pangan						
45	Meningkatnya Ketahanan dan Keragaman Konsumsi Pangan	Peningkatan Skor PPH	Persentase Angka Kecukupan Gizi X Bobot Masing-Masing Kelompok Pangan	Poin	DIKPANGAN	IKK
Pertanahan						
46	Meningkatnya Penataan Asset Daerah	Persentase Bidang Lahan Pemda yang Bersertifikat	$\frac{\text{Bidang Lahan Pemda yang Bersertifikat}}{\text{Jumlah Bidang pemda seluruhnya}} \times 100$	Persen	BPKAD	IKK
47		Konflik pertanahan yang Terfasilitasi penyelesaiannya melalui jalur non litigasi (Mediasi)	Jumlah Konflik pertanahan yang terfasilitasi penyelesaiannya melalui jalur non litigasi (mediasi)	Kasus		
Lingkungan Hidup						
48	Tercapainya Kelestarian fungsi lingkungan hidup serta meningkatnya pengurangan dan penanganan Sampah	Persentase Pengelolaan sampah	$\frac{\text{Volume sampah yang dikelola}}{\text{Volume produksi sampah perkotaan 1 tahun}} \times 100$	Persen	DLH	IKK
49	Menurunkan beban pencemaran lingkungan sesuai dengan baku mutu kualitas lingkungan dan laju kerusakan lingkungan hidup	Kualitas Air Sungai	$IP_s = \sqrt{\frac{(C_s/L_s)_w^2 + (C_s/L_s)_b^2}{2}}$	Indeks		
50		Kualitas Udara	$100 - [50/0.9 \times (I_{eu} - 0.1)]$	Indeks		

NO	ASPEK/ BIDANG URUSAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	PENJELASAN/RUMUS PENGHITUNGAN	SATUAN	PENANGGUNG JAWAB	KET
51	Terkendalnya kerusakan lingkungan hidup dan SDA untuk mengendalikan kualitas fungsi lingkungan yang memiliki daya dukung terhadap pengembangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat	Kualitas Tutupan Lahan	$100 - ((84,3 - (TH \times 100)) \times 50/54,3)$	Indeks		
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
52	Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persentase Penduduk Umur 0 - 18 tahun dalam kepemilikan akta kelahiran	$\frac{\text{Jumlah Anak Usia 0-18 Tahun yang memiliki Akta Kelahiran}}{\text{Jml Penduduk Usia 0-18 Tahun}} \times 100$	Persen	DISDUKCAPIL	IKK
53		Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk	$\frac{\text{Jumlah Penduduk ber KTP}}{\text{Jumlah Wajib KTP}} \times 100$	Persen		
54		Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga	$\frac{\text{Jumlah KK Yang diterbitkan}}{\text{Jumlah Seluruh KK}} \times 100$	Persen		
55			Cakupan Penerbitan Akta Kematian	$\frac{\text{Jumlah Akte Kematian Yang diterbitkan}}{\text{Jumlah Kematian Yang Terlapor}} \times 100$		

NO	ASPEK/ BIDANG URUSAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	PENJELASAN/RUMUS PENGHITUNGAN	SATUAN	PENANGGUNG JAWAB	KET
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
56	Meningkatnya Perkembangan di Bidang Pemerintahan, Kewilayahan serta Kemasyarakatan	Persentase Desa Dengan Kategori "Cepat Berkembang"	$\frac{\text{Jumlah Desa Dengan Kategori Cepat Berkembang}}{\text{Jumlah Seluruh Desa}} \times 100$	Persen	DPMD	IKK
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
57	Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Tahun } t - \text{Jumlah Penduduk Tahun } t-1}{\text{Jumlah Penduduk Tahun } t-1} \times 100$	Persen	DP2KBP3A	IKK
Perhubungan						
58	Terpenuhinya kecukupan sarana dan prasarana perhubungan	Persentase Wilayah Terhubung dengan Moda Transportasi	$\frac{\text{Jumlah Trayek Aktif}}{\text{Jumlah Trayek}} \times 100$	Persen	DISHUB	IKK
59		Persentase Jalur Trayek Aktif Menuju Pusat Perekonomian (Pasar)	$\frac{\text{Jumlah Jalur Trayek Aktif}}{\text{Jumlah Pasar (32 unit)}} \times 100$	Persen		
Komunikasi dan Informatika						
60	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Predikat Keterbukaan Informasi Publik	Penilaian Komisi Informasi (KI) Prov.NTB	Predikat	DISKOMINFO	IKK
Koperasi dan UKM						
61	Meningkatnya Jumlah Koperasi Aktif	Persentase koperasi yang aktif	$\frac{\text{Jumlah Koperasi Aktif}}{\text{Jumlah Seluruh Koperasi}} \times 100$	Persen	DISKOP UKM	IKK
62	Meningkatnya Jumlah UMK	Persentase UMK	$\frac{\text{Jumlah UMK Formal}}{\text{Jumlah Seluruh UMK}} \times 100$	Persen		IKK
Penanaman Modal						
63	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi	Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN)			DPMPSTP	IKU
		PMA	Nilai Realisasi PMA	Juta US \$		
		PMDN	Nilai Realisasi PMDN (Fasilitas)	Milyar Rupiah		
Pemuda dan Olah Raga						
64	Meningkatnya Kompetensi dan Peran Serta Pemuda	Persentase wirausaha muda	$\frac{\text{Jumlah Wirausahawan Muda Yang Aktif}}{\text{Jumlah Seluruh Wirausahawan Muda}} \times 100$	Persen	DISPORA	IKK
65		Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	$\frac{\text{Jumlah Organisasi Pemuda Yang Aktif}}{\text{Jumlah Organisasi Pemuda}} \times 100$	Persen		

NO	ASPEK/ BIDANG URUSAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	PENJELASAN/RUMUS PENGHITUNGAN	SATUAN	PENANGGUNG JAWAB	KET
66	Meningkatnya Cabor Potensial dan Unggulan	Persentase Prestasi Cabor Unggulan	Jumlah Perolehan Emas Pada Cabor Unggulan	X 100	Persen	
			$\frac{\text{Jumlah Cabor Unggulan (Sesuai SK Cabor Unggulan)}}{\text{Jumlah seluruh data sektoral}}$			
Statistik						
67	Meningkatnya Ketersediaan Data Penyelenggaraan	Ketersediaan data penyelenggaraan pemerintah	Jumlah Data Sektoral Yang tersedia	X 100	Persen	DISKOMINFO
			$\frac{\text{Jumlah seluruh data sektoral}}$			
Kebudayaan						
68	Meningkatnya Pelestarian Seni dan Budaya	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Kondisi Baik	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Kondisi Baik	X 100	Persen	DIKBUD
			$\frac{\text{Jumlah seluruh Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya}}$			
69		Persentase Sanggar Seni Aktif	$\frac{\text{Jumlah Sanggar Seni Yang Aktif}}{\text{Jumlah Sanggar Seni}}$	X 100	Kelompok	IKK
Perpustakaan						
70	Meningkatnya Minat Baca Masyarakat	Jumlah pengunjung perpustakaan	Jumlah pengunjung perpustakaan		Orang	DISARPUS
Kearsipan						
71	Meningkatnya Pengelolaan Arsip Daerah	Persentase OPD Yang Mengelola Arsip Secara Baku	Jumlah OPD Yang Mengelola Arsip Secara Baku	X 100	Persen	DISARPUS
			$\frac{\text{Jumlah Seluruh OPD}}$			
Urusan Pilihan						
Pariwisata						
72	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB dan Meningkatnya Kualitas Fasilitas Sarana Penunjang di Destinasi	Jumlah kunjungan wisatawan	Jumlah Kunjungan wisatawan		Orang	DISPAR
73		Lama tinggal wisatawan (<i>Length OF Stay</i>)	Rata - Rata Lama tinggal wisatawan		Hari	
74	Wisata	Jumlah desa wisata	Jumlah Desa Wisata		Desa	
Pertanian						
75	Meningkatnya Produksi Pertanian	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian	$\frac{\text{Produksi Tahun } n - \text{Produksi Tahun } (n-1)}{\text{Produksi Tahun } (n-1)}$	X 100	Persen	DIPERTA
76	Meningkatnya Nilai Tambah Produk Olahan Pertanian	Persentase Peningkatan Nilai Tambah Produk Olahan Pertanian	$\frac{\text{Nilai Tambah Produk Olahan Pertanian Tahun } n - \text{Nilai Tambah Produk Olahan Pertanian Tahun } (n-1)}{\text{Nilai Tambah Produk Olahan Pertanian Tahun } (n-1)}$	X 100	Persen	

NO	ASPEK/ BIDANG URUSAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	PENJELASAN/RUMUS PENGHITUNGAN	SATUAN	PENANGGUNG JAWAB	KET
Perdagangan						
77	Meningkatnya Nilai Ekspor Perdagangan Daerah	Nilai ekspor perdagangan	Nilai Ekspor Perdagangan	US \$	DISPERINDAG	IKK
Perindustrian						
78	Meningkatnya Pertumbuhan Industri	Pertumbuhan industri	$\frac{\text{Jumlah Industri Tahun } n - \text{Jumlah Industri Tahun } n-1}{\text{Jumlah Industri Sampai Dengan Tahun } n} \times 100$	Persen	DISPERINDAG	IKK
Transmigrasi						
79	Menurunnya Angka Pengangguran	Persentase transmigran yang diberangkatkan	$\frac{\text{Jumlah Transmigran Yang diberangkatkan}}{\text{Jumlah Transmigran Yang diusulkan}} \times 100$	Persen	DISNAKER	IKK
Kelautan dan Perikanan						
80	Meningkatnya Produksi Perikanan	Produksi Perikanan	Produksi Perikanan	Ton	DKP	IKK
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang						
Administrasi Pemerintahan						
81	Meningkatnya Pembinaan dan Pengkoordinasian	Nilai LPPD	Nilai LPPD	Nilai	SETDA	IKK
82	Dalam Perumusan Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Hukum, Pemerintahan dan Organisasi	Persentase Ketercapaian Indikator Kinerja Bidang Pemerintahan dan Aparatur	$\frac{\text{Indikator Kinerja Bidang Pemerintahan dan Aparatur Yang tercapai}}{\text{Seluruh Indikator Kinerja Bidang Pemerintahan dan Aparatur}} \times 100$	Persen		
83	Meningkatnya Pembinaan dan Pengkoordinasian Penyusunan Pedoman dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Ketercapaian Indikator Kinerja Bidang Perekonomian dan Pembangunan	$\frac{\text{Indikator Kinerja Bidang Perekonomian dan Pembangunan}}{\text{Seluruh Indikator Kinerja Bidang Perekonomian dan Pembangunan}} \times 100$	Persen		

NO	ASPEK/ BIDANG URUSAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	PENJELASAN/RUMUS PENGHITUNGAN	SATUAN	PENANGGUNG JAWAB	KET
84	Meningkatnya Pembinaan dan Pengkoordinasian Penyusunan Pedoman dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Kesejahteraan Rakyat, Perlengkapan, Umum, Humas dan Protokol	Persentase Ketercapaian Indikator Kinerja Bidang Administrasi Umum dan Kesra	$\frac{\text{Indikator Kinerja Bidang Administrasi Umum dan Kesra}}{\text{Seluruh Indikator Kinerja Bidang Administrasi Umum dan Kesra}} \times 100$	Persen		
85	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Cakupan Perda Inisiatif DPRD	$\frac{\text{Jumlah Perda Inisiatif DPRD}}{\text{Jumlah Seluruh Perda}} \times 100$	Persen	SETWAN	IKK
Perencanaan Pembangunan						
86	Meningkatnya Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase RKPD yang Selaras dengan RPJMD	$\frac{\text{Jumlah Program RKPD Yang Selaras Dengan Program Pada RPJMD}}{\text{Jumlah Program Pada RPJMD}} \times 100$	Persen	BAPPEDA	IKK
87		Persentase Renstra OPD yang Selaras dengan RPJMD	$\frac{\text{Jumlah Program Pada Renstra OPD Yang Selaras Dengan Program Pada RPJMD}}{\text{Jumlah Program Pada RPJMD}} \times 100$	Persen		
88		Persentase Renja OPD yang selaras dengan RKPD	$\frac{\text{Jumlah Program pada Renja OPD Yang Selaras Dengan Program Pada RPJMD}}{\text{Jumlah Program Pada RPJMD}} \times 100$	Persen		
Keuangan						
89	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Nilai Realisasi PAD	Nilai Realisasi PAD	Rp. Milyar	BAPENDA	IKK
90	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Penetapan APBD Tepat Waktu	Penetapan APBD Tepat Waktu	Status	BPKAD	IKK
Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan						
91	Meningkatnya Kapasitas SDM ASN	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat (Struktural)	$\frac{\text{Jumlah ASN yang telah mengikuti diklat (Struktural+Fungsional)}}{\text{Jumlah Seluruh Pejabat Struktural}} \times 100$	Persen	BKDPSDM	IKK
92			Meningkatnya Peran Serta Perempuan Dalam Pembangunan			

NO	ASPEK/ BIDANG URUSAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	PENJELASAN/RUMUS PENGHITUNGAN	SATUAN	PENANGGUNG JAWAB	KET
Penelitian dan Pengembangan						
93	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan Untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan untuk perencanaan pembangunan	$\frac{\text{Jumlah Kajian Yang Dimanfaatkan untuk perencanaan pembangunan}}{\text{Jumlah Seluruh Kajian yang dilaksanakan}} \times 100$	Persen	BAPPEDA	IKK
Pengawasan						
94	Terwujudnya Wilayah Berintegritas	Persentase Unit Layanan Yang ditetapkan sebagai Zona Integritas	$\frac{\text{Unit Layanan Yang ditetapkan menjadi zona integritas}}{\text{Jumlah Unit Layanan (33 unit)}} \times 100$	Persen	INSPEKTORAT	IKK
95		Persentase OPD mencapai Maturitas SPIP Level 3	$\frac{\text{Jumlah OPD Yang mencapai Maturitas SPIP Level 3}}{\text{Jumlah Seluruh OPD}} \times 100$	Persen		
96		Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan yang telah ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah Tindak Lanjut terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan}}{\text{Jumlah seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan}} \times 100$	Persen		
97		Persentase OPD dengan nilai AKIP A	$\frac{\text{Jumlah OPD dengan Nilai AKIP A}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100$	Persen		
98		Persentase OPD memiliki nilai/ indeks Reformasi Birokrasi 83,85	$\frac{\text{Jumlah OPD dengan Nilai Indeks Reformasi Birokrasi 83,85}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100$	Persen		
99	Meningkatnya Profesionalitas SDM APIP	Persentase APIP yang memiliki sertifikasi standar kompetensi	$\frac{\text{Jumlah APIP yang sudah mengikuti diklat dan memiliki sertifikat}}{\text{Jumlah Seluruh APIP}} \times 100$	Persen		

BUPATI LOMBOK BARAT, 
H. FAUZAN KHALID



Lampiran III
PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT NOMOR ____
TAHUN 2019 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2019
- 2024

**KEPUTUSAN KEPALA (NAMA PERANGKAT DAERAH)
KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR: _____**

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (NAMA PERANGKAT DAERAH)
KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2019-2024**

**KEPALA (NAMA PERANGKAT DAERAH) KABUPATEN
LOMBOK BARAT,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (3) Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor ____ Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Lombok Barat, perlu menetapkan Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Indikator Kinerja Utama (NAMA PERANGKAT DAERAH) Kabupaten Lombok Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

- Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 169);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat tahun 2015 Nomor 130);
 12. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor ___ Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja (NAMA



PERANGKAT DAERAH) Kabupaten Lombok Barat;
13. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor ____ Tahun 2019
Tentang Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Lombok
Barat Tahun 2019 - 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama (NAMA PERANGKAT DAERAH),
sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini,
merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh
(NAMA PERANGKAT DAERAH) Kabupaten Lombok Barat
untuk menetapkan kinerja tahunan, menyusun dokumen
penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas
kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja tahun
2020-2024.

KEDUA : Pengukuran dan Penyusunan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Perangkat Daerah, dilakukan oleh Sub Bagian
Program pada Sekretariat (NAMA PERANGKAT DAERAH)
Kabupaten Lombok Barat, dan disampaikan kepada
Bupati, melalui Bagian Organisasi dan Tata Laksana
Sekretariat Daerah.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal: (tanggal akan di informasikan
kemudian)

KEPALA (NAMA PERANGKAT DAERAH)
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

Nama
Pangkt/Gol Ruang
Nip.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA (NAMA PERANGKAT DAERAH)
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA (NAMA PERANGKAT DAERAH)
KABUPATEN LOMBOK BARAT

TUGAS DAN FUNGSI (NAMA PERANGKAT DAERAH)

- A. TUGAS : Sesuaikan PERBUP Tugas dan Fungsi OPD
- B. FUNGSI : Sesuaikan PERBUP Tugas dan Fungsi OPD

INDIKATOR KINERJA UTAMA (NAMA PERANGKAT DAERAH)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Satuan	Penanggungjawab	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

KEPALA (NAMA PERANGKAT DAERAH)
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

Nama
Pangkt/Gol Ruang
Nip.

